BAB II

KERANGKA ANALISA POLITIK KEKUASAAN KAMPUS PERSPEKTIF PILIHAN RASIONAL JAMES S. COLEMAN

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa karya tulis dari hasil penelitian yang terkait dengan judul skripsi ini tentang

1. Skripsi Abdul Khalim, Dinamika Politik Mahasiswa (Studi Penolakan Aliansi Partai Mahasiswa Untuk Perubahan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013)[1].

   Isi pokok skripsi: bahwa aksi penolakan yang dilakukan APMP terhadap pelaksanaan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013 dilandasi oleh dua faktor yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif. Faktor subyektif adalah kesadaran politik mahasiswa, perjuangan ideologi partai politik mahasiswa, kepentingan untuk melakukan perubahan dan menemukan sosok musuh bersama. Sementara faktor obyektif adalah pembentukan undang-undang pemilwa yang tidak aspiratif, partisipatoris, ketidak transparanan dalam pembentukan KPUM, tidak dilibatkan dalam proses agenda Pemilwa dan dominasi partai penguasa.

   Kesamaan penelitian ini adalah membahas tentang politik mahasiswa dalam pemilihan yang ada di kampus. Sedangkan perbedaan

[1] Skripsi Abdul Khalim, Dinamika Politik Mahasiswa (Studi Menolakan Aliansi Partai Mahasiswa Untuk Perubahan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini adalah fokusnya, yaitu penelitian membahas tentang aksi penolakan yang dilakukan APMP terhadap pelaksanaan pemilwa, sedangkan penulis mengkaji masalah perebutan kekuasaan dan respon mahasiswa pada saat pemira dengan tinjauan sosiologi pilihan rasional.

2. Skripsi Rahmatul Amaliyah, Strategi Pemenangan Pasangan Abdul Khalid dan Siswadi (Aksi) dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA) UIN SUNAN KALIJAGA 2011[2].

   Isi pokok skripsi: bahwa strategi pemenangan pasangan AKSI dalam kontestasi Pemilwa UIN Sunan Kalijaga 2011, dimana terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk proses pemenangan tersebut, diantaranya: pertama, strategi keilmuan dengan mengajak pemilih mahasiswa UIN Sunan Kalijaga berdialektika tentang keilmuan maupun tentang pendidikan politik bukan berbicara tentang politik praktis. Kedua: melalui pendekatan ideologi partai. Dengan ideologi, kekompakan simpatisasi partai maupun pemilih dapat diikat dalam satu kesatuan tujuan. Ketiga, menjadi fakultas baru sebagai media untuk mensosialisasikan visi, misi dan progam pasangan. Berangkat dari mahasiswa fakultas yang terhitung baru, menjadikan harapan baru pula dalam dinamika politik mahasiswa di kampus UIN Sunan Kalijaga.

   Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat masalah pemilihan umum mahasiswa (PEMILWA) atau pemilihan raya (PEMIRA) yang terjadi di kampus. Sedangkan perbedaannya adalah

[2] Skripsi Rahmatul Amaliyah, Strategi Pemenangan Pasangan Abdul Khalid dan Siswadi (Aksi) dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA) UIN SUNAN KALIJAGA 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat dan kajiannya. Perbedaan tempat, Pemilwa di UIN Sunan kalijaga yogyakarta dan Pemira di UIN Sunan ampel surabaya. Perbedaan kajian, penelitian ini mengkaji pada strategi pemenangan pasangan AKSI dalam pemilwa UIN Sunan Kalijaga tahun 2011, penelitian penulis berfokus pada proses perubutan kekuasaan dalam pemilihan raya UIN Sunan Ampel Surabaya 2016.

3. Jurnal Dyah Ayu Herlyne Luvitasari, Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya Jurusan Tahun 2013 Sebagai Upaya Pembentukan Kehidupan Demokrasi di Lingkungan PMPKN FIS UNESA[3].

   Isi pokok: bahwa untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi politik mahasiswa PMP-KN FIS UNESA dalam Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRO) jurusan PMP-KN tahun 2013 dan persepsi mahasiswa PMP-KN FIS UNESA terhadap peran kegiatan PEMIRA HIMAPRO jurusan PMP-KN tahun 2013 dalam perwujudan nilai-nilai demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan data partisipasi politik mahasiswa PMP-KN angkatan 2007 rendah (33,84%) dan termasuk partisipasi politik tertekan (apatis), partisipasi politik mahasiswa PMP-KN angkatan 2008 rendah (46,90%) dan termasuk partisipasi politik militant radikal, partisipasi politik mahasiswa PMP-KN angkatan 2009 rendah (47,02) dan termasuk partisipasi politik militant radikal,

[3]Jurnal Dyah Ayu Herlyne Luvitasari, Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya Jurusan Tahun 2013 Sebagai Upaya Pembentukan Kehidupan Demokrasi di Lingkungan PMPKN FIS UNESA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi politik mahasiswa PMP-KN angkatan 2010 tinggi (51,69%) dan termasuk partisipasi politik militant radikal, partisipasi politik mahasiswa PMP-KN angkatan 2011 tinggi (56,72%) dan termasuk partisipasi politik aktif, partisipasi politik mahasiswa PMP-KN angkatan 2012 tinggi (69,43%) dan termasuk partisipasi politik aktif. Hasil kedua yang diperoleh dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa PMP-KN FIS UNESA menyatakan bahwa kegiatan PEMIRA HIMAPRO jurusan PMP-KN tahun 2013 berperan dalam perwujudan nilai-nilai demokrasi.

Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema tentang politik mahasiswa. Perbedaan penelitian adalah tempat, kajian dan metode penelitian. Perbedaan tempat, penelitian ini bertempat di UNESA dan penulis meneliti di UIN Sunan Ampel Surabaya. Perbedaan kajian penelitian mengkaji masalah Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Raya Jurusan Tahun 2013 Sebagai Upaya Pembentukan Kehidupan Demokrasi. Penulis meneliti tentang masalah perebutan kekuasaan kampus. Dan terakhir perbedaan metode penelitian. Peneliti memakai metode penelitian kuantitatif, sedangkan penulis memakai metode penelitian kaalitatif.

4. Skripsi Saepudin, MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI MELALUI PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Kasus Terhadap Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)[4].

Isi pokok skripsi ini, membahas tentang penyelenggaraan pemilihan pimpinan organisasi di Ormawa tingkat Universitas melalui mekanisme Pemilihan Umum (PEMIRA). Akan tetapi tingkat partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemilu Raya Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI masih dirasa kurang, hal tersebut nampak dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya dalam Pemilu. Dari 36.024 mahasiswa UPI yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) hanya 9.502 mahasiswa yang memberikan suara dalam Pemira. Kemelekan politik sebagian pemilih dalam menentukan pilihan masih rendah, dalam arti tidak semua pemilih melihat sosok pilihannya dari kapabilitas dan eksistensinya sebagai aktivis mahasiswa. akan tetapi dari fisik calon serta dari kedekatan antara pemilih dengan calon. Untuk meningkatkan kemelekan politik mahasiswa, Ormawa di UPI menyelenggarakan diskusi politik yang dikemas melalui kegiatan kajian yang membahas isu-isu kampus sampai pada isu-isu seputar permasalahan politik di Indonesia, seminar pendidikan politik, pelatihan legislatif mahasiswa, dan lain sebagainya.

Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan adalah gejala apatisme mahasiswa terhadap organisasi (BEM REMA UPI) yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan

[4]Skripsi Saepudin, MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI MELALUI PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN (Studi Kasus Terhadap Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemahasiswaan oleh lembaga, kurangnya minat mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi, menurunnya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap kinerja BEM REMA UPI, serta pembentukan paradigma cepat lulus oleh Universitas. Pembelajaran demokrasi melalui pengembangan organisasi kemahasiswaan dapat dilakukan dengan menerapkan student organization models.

Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat masalah pemilihan umum mahasiswa (PEMIRA) yang terjadi di kampus. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan kajiannya. Perbedaan tempat, Peneliti betempat di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung dan Penulis bertempat di UIN Sunan ampel surabaya. Perbedaan kajian, penelitian ini mengkaji pada Pembelajaran demokrasi melalui pengembangan organisasi kemahasiswaan, penelitian penulis berfokus pada demokrasi sebagai proses perubutan kekuasaan.

B. Tinjauan Politik Kekuasaan Kampus

1. Politik

Sejak akhir abad XIX (ke-19) ilmu politik, secara bertahap semakin kuat posisi dan kedudukannya, walaupun agak lambat perkembangannya secara metodologi ilmiah pada masa lampau. Telah pula ditegaskan keabsahan dan kemandiriannya sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Jadi jika ditinjau dari tahap perkembangannya sebagai ilmu memang tak dapat disangkal bahwa ilmu politik agak tertinggal jika dibandingkan ilmu lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu mengapa ada pakar ilmu politik yang menyebut ilmu ini sebagai ratu ilmu kemasyarakatan? Kemungkinan alasannya antara lain, karena ilmu politik mempelajari serta memusatkan kajiannya pada hal-ihwah yang menyangkut gejala-gejala yang paling hakiki dan yang mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perjuangan untuk kekuasaan (struggle for power), atau minimal perjuangan untuk hidup (struggle for life) di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ilmu poitik juga mempelajari negara dan pemerintahan yang merupakan organisasi pada peringkat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi umat manusia. Hasrat untuk memperoleh kekuasaan, tak dapat dihindari ada pada setiap manusia. Namun, hubungan-hubungan antara menusia yang berdasarkan hasrat yang satu ini perlu pengaturan dan pengendalian.

Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang politik. Di awal perlu dibahas tentang pengertian politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehodupan yang lebih baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gernah ripah loh jinawi*[5].

Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber kehidupan, atau perlu dicari suatu cara untuk distribusi sumber daya agar semua warga merasa

[5] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta:Gramedia,2008),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahagia dan puas. Ini adalah politik[6]. Aristoteles memulai pembahasan dalam bukunya *politics* (ditulis tahun 335 SM), dengan kata-kata bahwa "secara alamiah manusia adalah makhluk yang berpolitik" atau disebut dengan *zoon politikon.* Yang dimaksud Aristoteles adalah bahwa politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam bermasyarakat. Jika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia, maka mereka tidak lepas dari keterlibatan dalam hubungan yang bersifat politik.

Oleh karena itu, politik pada hakikatnya adalah bagian dari pada umat manusia. Dan tidak bisa dipisahkan dari keterpaduannya dengan berbagai aspek kehidupan. Setiap manusia melakukan hal-hal yang bersifat politik serta berada dalam lingkungan yang disebut "sistem politik"[7].

Jika melihat definisi-definisi ilmu politik, yang sampai kini cukup banyak ragamnya, dapat kita simpulkan bahwa ilmu politik adalah hubungan antara manusia satu sama lain dalam bentuk adanya pemahaman, penghayatan, sampai pengaturan mengenai hal-hal untuk memperoleh, mempertahankan dan menyelenggarakan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Baik timbul dari hasrat manusia sendiri maupun yang timbul dari proses interaksi di dalam masyarakat atau kesatuan yang terorganisasi.

---

[6] Ibid,14
[7] Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung:Eresco,1993),1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar politik adalah berkenaan dengan kekuasaan pengaruh, kewenangan pengaturan, dan ketaatan atau ketertiban. Maka hal-hal yang menyangkut politik antara lain:

a. Kekuasaan (power)
b. Kewenangan (authority)
c. Ketaatan atau ketertiban (order)

Ilmu politik dalam hal yang sempit, memang menyangkut hal-hal tentang negara dan pemerintahan. Namun, dalam arti yang luas adalah mencakup sekitar 5 objek, sasaran atau pusat perhatian yaitu:

a. Negara (state)
b. Kekuasaan (power)
c. Pengambilan keputusan (decisionmaking)
d. Kebijaksanaan (policy)
e. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)

1) Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara sebagai inti dari ilmu politik, memusatkan perhatiannyya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya.

Roger F.soltau misalnya, dalam bukunya yang berjudul *introduktion to politich* mengatakan bahwa "ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antar negara.

2) Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku.

Kekuasaan sebagai inti dari politik. Bahwa politik menyangkut masalah tentang merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasaanya dianggap sebagai perjuangan kekuasaan dengan mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

3) Pengambilan keputusan

Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah penggambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambila keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dan dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan untuk mncapai tujuan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Kebijakan umum

Kebijaka adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tjuan dan cara untuk mencapai tujuan itu, pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai keputusan untuk melaksanakannya.

Kebijakan umum menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituangkan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang dalam hal pemerintahan.

5) Pembagian atau alokasi

Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik tidak lain dan tidak bukan adalah Pembagian dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa bagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.

Dalam ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, diinginkan, mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat absrak seperti penilaian atau suatu asas misalnya seperti kejujuran, kebebasan berpendapat dan kebebasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mimbar. Nilai juga bisa bersifat konkret (material), seperti kekayaan[8].

2. Kekuasaan Sebagai Konsep Ilmu Politik

Diantara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengerankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik khususnya, malahan pada suatu ketika politik dianggap identik dengan kekuasaan.

Biasanya kekuasaan diselenggarakan melalui isyarat yang jelas. Ini sering dinamakan kekuasaan manifes (*manifest power*). Namun kadang-kadang isyarat itu tidak ada.

Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara untuk menyelenggaraka kekusaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh adalah kekerasan fisik. Kekuasaan dapat juga diselenggarakan lewat kuersi (*ceorcion*), yaitu melalui ancaman akan diadakan sanksi. Suatu upaya yang sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi yaitu proses penyakinan, argumentasi atau menunjuk pada pendapat seorang ahli. Selain itu dapat digunakan pula cara lain. Cara lain ini adalah dengan tidak mengatakan denda tetapi member ganjaran (*reward*) atau isentif, imbalan, atau kompensasi.

3. Politik Sumber Kekuasaan

Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Selanjutnya kita perlu membedakan antara dua istilah

[8] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta:Gramedia,2008),17-20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyangkut konsep yaitu *scope of power dan domain of power.* Cakupan kekuasaan (*scope of power*) menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan yang menjadi obyek dari kekuasaan. Dan istilah kekuasaan (*domain of power*) menjawab pertanyaan siapa-siapa saja yang dikuasai oleh orang atau kelompok yang berkuasa, jadi menunjuk pada pelaku, kelompok organisasi atau kolektivitas yang kena kekuasaan.

Dalam suatu hubungan kekuasaan (*power relationship*) selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, selalu ada hubungan tidak seimbang atau asimetris. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan (*dependency*) dan lebih timpang hubungan ini, lebih besar pula sifat ketergantungannya. Hal ini oleh generasi pemikir dekade 20-an sering disebut sebagai dominasi, hegemoni dan penundukan.

4. Otoritas/Wewenang dan Legitimasi Sebagai Sumber Kekuasaan

Ada beberapa pengertian yang erat dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang dan legitimasi atau keabsahan. Seperti dengan konsep kekuasaan, disini pun bermacam-macam perumusan penemuan. Perumusan yang paling mengenai sasaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karangannya *An Analysis of Social Power* yang mengatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang di lembagakan (*institutionalized power*). Dengan nada yang sama dikatakan oleh Harold D.Laswell dan Abraham Kaplan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam buku *power and society* wewenang adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang (*authoroty*) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat paeraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.

Selain konsep wewenang juga dikenal konsep legitimasi (*legitimacy*) yang terutama penting dalam suatu sistem politik. Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggotan masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Jadi, mereka diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluaran oleh penguasa dipatuhi. Dilihat dari sudut penguasa, dapat disebut disini ucapan A.M. Lipset legitimasi mencakup kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang peling wajar untuk masyarakat itu.

Jika suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar-dasar dan tujuan-tujuan masyarakat, keabsahan dapat tumbuh dengan kukuh, sehingga unsur paksaan serta kekerasan yang dipaksa oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap rezim dapat ditetapkan sampai minimum. Maka dari itu pemimpin dari suatu sistem politik akan selalu mencoba membangun dan mempertahankan keabsahan di kalangan rakyat karena hal itu merupakan dukungan yang paling mantap.

5. Kekuasaan Sebagai Pengaruh

kekuasaan adalah pengaruh. Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kekuasaan dapat mengadakan sanksi dan pengaruh. Namun dalam forum diskusi ilmiah sering dipertayakan apakah kekuasaan dan pengaruh merupakan dua konsep yang berbeda, dan apakah satu diantaranya merupakan konsep pokok. Jika benar demikian yang manakah yang pengertian pokok.

Kekuasaan adalah untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat yang akan benar-benar dilaksanakan atau berupa ancaman sanksi. Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tententu, dapat dikataan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.

Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untu bertindak. Akan tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan kekuasaan, ia kadang-kadang mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur psikologis dan menyentuh hati dan karena itu sering kali cukup berhasil[9].

6. Konsep Gramsci Tentang Hegemoni

Kekerasan dan Konsensus

Hegemoni adalah suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas dibawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi[10]. Gramsci menggunakan *centaur* metologi yunani yaitu setengah binatang setengah manusia, sebagai simbol dari suatu tindakan politik. Antara lain, kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakn kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologi. Hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Gramsci menggunakan kata *direzione* (kepemimpinan, pengarahan) secara pergantian dengan *egemonia* (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominazione* (dominasi).

7. Hubungan Masyarakat Dengan Proses Politik

a. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan bagian dari kajian politik dalam pengertian proses. Oleh karena itu, pengertian sosialisasi politik senantiasa berkaitan dengan segenap proses dalam kehidupan politik. Sosialisasi secara mendasar adalah proses hasil

[9]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta:Gramedia,2008),59-67.

[10] Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta:Insist press, Pelajar Pustaka, 1999),19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belajar dari suatu pengalaman[11]. Sosialisasi memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas yang luas, baik terkait dengan pengetahuan atau informasi, motif atau nilai maupun sikap.

Dengan demikian, pengertian sosialisasi politik sedekit banyak tidak bisa lepas darii pengertian-pengertian sosialisasi. Sosialisasi politik adalah proses pengenalan sistem politik pada seseorang, kelompok atau masyarakat serta respon yang mereka berikan terhadap gejala-gejala politik yang ada dan mereka hadapi. Lebih sederhana lagi, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Sikap dan orientasi ini mendapatkan pengaruh kuat terhadap tingkah partisipasi politik.

Dari segi bentuk dan metode penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori. Yaitu:

1. pendidikan politik.
2. indoktrinisasi politik.

Pendidikan politik merupakan suatu proses yang dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Mulai proses ini masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma dan simbol politik negara dari berbagai pihak sistem politik.

[11]Said Gatara dkk, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian,* (Bandung:Pustaka Setia,2007),77-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan politik cenderung hidup dan berkembang dalam masyarakat dan sistem politik demokrasi. Fungsi lembaga politik atau partai politik yang berada dalam payung sistem politik demokrasi adalah pendidikan politik. Dengan demikian sistem politik demokrasi, partai politik sesungguhnya memiliki fungsi sosialisasi.

Indoktrinisasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang mereka anggap sebagai ideal dan baik.

b. Partisipasi Politik

Penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik yaitu, adanya modernisasi disemua bidang, perubahan struktur kelas, pengaruh kaum intelektual atau kominikasi modern, konflik antar kelompok pemimpin politik dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Secara spesifik, kita dapat melihat seorang individu dalam memberikan partisipasi politik.

Adapun definisi partisipasi politik menurut para ahli sebagai berikut[12]:

Samuel Huntington dan Joan M. Nelson adalah kegiatan warga preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi

[12]Said Gatara dkk, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian,* (Bandung:Pustaka Setia,2007),92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Konsepnya berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan, memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik dan dilakukan oleh negara preman.

Michael Rush dan Philip Althoff adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Konsepnya berupa keterliibatan individu dalam sistem politik dan memiliki tingkatan partisipasi.

Miriam Budiarjo adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan politik yaitu dengan cara memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijaka pemerintahan. Konsepnya berupa kegiatan idividu atau kelompok dan bertujuan ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik.

Berdasarkan beberapa definisi diatas terdapat substansi mengenai partisipasi politik antara lain:

1) Kegiatan nyata.
2) Bersifat sukarela.
3) Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa baik individu maupun kelompok.
4) Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Memiliki tingkatan partisipasi.

c. Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu perkembangan sekaligus pilihan dari sistem politik yang digunakan dalam suatu negara. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* artinya rakyat atau penduduk setempat dan *kartos* yang artinya pemerintahan. Secara bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak. Dan manurut istilah adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kekuasaan negara berada ditangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh kehendak rakyat[13].

Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga politik yang dapat menompang keberlangsungan suatu sistem demokrasi yang baik. Ada 6 lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi yakni:

1) Para pejabat yang dipilih.
2) Pemilihan umum.
3) Kebebasan berpendapat.
4) Akses informasi alternatif.
5) Otonomi asosiasional.
6) Hak kewarganegaraan yang inklusif.

[13]Said Gatara dkk, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung:Pustaka Setia,2007),190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kampus Sebagai Kantong Perubahan

Pembicaraan tentang kampus segera mengingat seseorang akan kehidupan ilmiah dengan ciri utama kebebasan berfikir dan berpendapat, kreatifitas, argumentatif, tekun dan melihat jauh kedepan sambil mencari manfaat praktis dari suatu ide atau penemuan[14]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kampus adalah tempat semua kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi[15]. Perpaduan ciri tersebut dalam kehidupan kampus melahirkan gaya hidup tersendiri yang merupakan variasi dari corak kehidupan yang menjadikan kampus sebagai pedoman dan harapan masyarakat atau sering sebut dengan *agen of change and control.*

Peran kampus sebagai pusat pembaharuan masyarakat telah menjadi fokus baru kehidupan kampus sampai awal kemerdekaan. Revolusi dan kemerdekaan dengan segala aspirasi serta inisiatif yang dibuahkannya telah memberikan peran aktif maupun pasif kampus di dalam proses politik.

Tinjauan terhadap intelektual kampus dengan lingkungannya yaitu masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya membawa kita kepada dua kemungkinan. Pertama, kampus mengambil inisiatif melalui penawaran karya, gerakan pembaharuan sampai gerakan politik. Dan kedua, kampus bersikap pasif maksutnya hanya menanpung dan memberikan reaksi kepada inisiatif pihak luar

[14] Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan*,(Yogyakarta:Insist Press,1999),21.

[15] Tim Penyusun Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kampus dijadikan arena kekuatan-kekuatan politik atau patner yang sederajat dengan birokrasi[16].

9. Makna Politik Dari Organisasi Mahasiswa

Selain ilmu, apakah yang menarik diperbincangkan bagi kalangan aktifis mahasiswa? Jawaban yang muncul pertama kali adalah politik. Ya, politik tidak bisa lepas dari aktifis kampus. Selain politik sebagai alat mewujudkan cita-cita organisasi, politik juga memiliki pelajaran implementasi pelatihan kepemimpina yang digeluti mahasiswa.

Tidak asing lagi, organisasi mahasiswa seperti PMII, HMI, GMNI, PMKRI dan organisasi mahasiswa lainnya, yang pertama diajarkan adalah memberikan nilai-nilai dasar masing-masing organisasi. Karena organisasi membutuhkan proses regenerasi, tentunya diperlukan pelatihan kepemimpinan, berlomba-lomba menjadi pucuk pimpinan dalam suatu organisasi adalah fenomena yang lazim dikalangan aktifis.

Dinamika pergerakan adalah bagian dari proses politik. Makna politik memang banyak, setiap orang memiliki kesimpulan tersendiri dalam mengartikan politik. Salah satu arti politik bagi kalangan aktifis adalah sebagai alat perjuangan[17]. Ya, politik diartikan sebagai alat memperjuangkan ideologi organisasi. Dengan politik, perwakilan organisasi bisa dikirimkan menduduki posisi strategis. Sebagai

[16] Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan*,(Yogyakarta:Insist Press,1999),22.
[17] Rosyid, *Dari Mahasiswa Untuk Daerah*,(Sidoarjo:Bunga Rampi,2016),4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh, dalam memperebutkan kepengurusan senat mahasiswa biasa akan diwarnai dari aktifis barbagai organisasi. Saat itulah mereka akan merebutkan posisi tertinggi.

Siapa yang menag dalam kompetesi merebutkan senat, itulah yang akan mudah mewujudkan misi organisasi. Alasannya jelas, dengan merebutkan sektor di senat mahasiswa, organisasi memiliki wewenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang dimanfaatkan sebagai penyalur misi organisasi.

Proses merebutkan senat, proses membuat kebijakan, bagaimana stategi kebijakan, hingga siapa sasaran kebijakan adalah bagian dari politik. Atau tepatnya, bagi kalangan mahasiswa adalah proses belajar politik.

Proses politik mahasiswa biasanya terjadi. Kontruksi-dekontruksi-rekontruksi adalah bagian tak terpisahkan bagi pelajaran politik mahasiswa. Apalagi konflik, adalah bagian yang harus ada dalam sebuah proses politik. Tujuannya, membuat karakter dan mental pemimpin dalam berorganisasi. Bahkan kritik pribadi.

Sedikitnya begitulah fungsi politik bagi kalangan aktifis mahasiswa. Mereka akan mampu memahami banyak watak dan kultur dari banyak orang. Itulah pentingnya belajar politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pilihan Rasional James S. Coleman

Dalam penelitian ini menggunakan teori Pilihan Raional James S. Coleman. Teori Pilihan Rasional secara umum berada pada posisi marginal dalam arus utama teori sosiologi. Teori pilihan rasional menjadi salah satu teori "panas" dalam sosiologi kontemporer.

Coleman berargumen bahwa sosiologi seharusnya memusatkan perhatian pada sistem sosial namun fenomena makro tersebut harus dijelaskan oleh faktor di dalamnya, dengan individu sebagai prototepinya. Ia lebih suka bekerja pada level ini karena beberapa alasan, termasuk fakta bahwa biasanya data dikumpulkan pada level individu dan selanjutnya harus disusun agar berkembang pada level sistem. Di antara alasan memilih fokus pada level individu adalah bahwa individulah tempat " intervensi" pada awalnya untuk menciptakan perubahan sosial. Inti perspektif Coleman adalah gagasan bahwa teori sosial tak hanya merupakan latihan akademis, tetapi harus dapat mempengaruhi kehidupan sosial melalui "intervensi" tersebut[18].

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa "tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan juga tindakan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)". Namun kemudian coleman berargumen bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, konsep yang melihat aktor memilih tindakan-

[18] George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Teori Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern, Edisi Terbaru*, (Yogyakarta:Kreasi Wacana,2013),477.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan yang akan memaksimalkan keuntungan, atau pemuasan kebutuhan dan keinginannya.

Ada dua elemen kunci dalam teorinya yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang dikendalikan aktor dan yang diinginkannya. Berdasarkan dua elemen ini, Coleman memerinci bagaimana interaksi keduanya mengarah pada level sistem :

Basis minimal bagi sistem tindakan sosial adalah dua aktor, yang masing-masing memiliki kontrol atas sumber daya kepentingan satu sama lain. Adalah kepentingan setiap orang akan sumber daya agar berada di bawah kontrol orang lain, yang bawa keduanya, sebagai aktor yang memiliki tujuan, terlibat dalam tindakan yang melibatkan satu sama lain. Satu sistem tindakan adalah struktur ini, bersama dengan fakta bahwa aktor memiliki tujuan, masing-masing memiliki tujuan untuk memaksimalkan realisasi kepentingannya, yang memeberikan karakter interdependen, atau karakter sistemis, kepada tindakan-tindakan mereka[19].

Coleman mengakui bahwa dalam kehidupan nyata orang tak selalu berperilaku rasional, tetapi ia merasa bahwa hal ini hampir tak berpengaruh pada teorinya. Ia berasumsi bahwa ramalan teoritis yang ia buat adalah untuk melihat apakah aktor bertindak tepat menurut rasionalitas atau menyimpang dari cara-cara yang diamati (menyimpang dari rasionalitas).

Tindakan rasional individu dilanjutkannya dengan memusatkan perhatian pada masalah hubungan makro-mikro atau bagaimana cara

[19] Ibid, 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gabungan tindakan individual menimbulkan perilaku sistem sosial. Secara inti ia memusatkan perhatian pada aspek hubungan makro-mikro atau dampak tindakan individual terhadap tindakan individu lain. Salah satu kunci gerakan dari mikro ke makro adalah mengakui wewenang dan hak yang dimiliki oleh seorang individu terhadap individu lain. Berdasarkan terapannya, Coleman tertarik pada diagnosis dan solusi atas masalah-masalah ini.

1. **Perilaku Kolektif** : Teori pilihan rasional dapat menganalisis perilaku kolektif, meskipun sifat perilaku kolektif tak stabil dan kacau. Teori pilihan rasional dapat menjelaskan penyebab adanya perilaku kolektif yang liar dari seorang atau beberapa aktor terhadap aktor lain. Menurut teori pilihan rasional, adanya perilaku yang demikian dikarenakan mereka berupaya memaksimalkan kepentingan mereka. Adanya upaya memaksimalkan kepentingan individual tersebut menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa aktor dan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, dalam perilaku kolektif, adanya upaya memaksimalkan kepentingan individu tak selalu menyebabkan keseimbangan sistem.
2. **Norma :** Menurut Coleman, norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang. Mereka memahami keuntungan dibentuknya norma tersebut, dan kerugian apabila terjadi pelanggaran terhadap norma. Aktor berusaha memaksimalkan utilitas mereka, sebagian dengan menggerakkan hak untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh sebagian hak untuk mengendalikan aktor lain. Tetapi ada pula keadaan di mana norma berperan menguntungkan orang tertentu dan merugikan orang lain. Dalam kasus tertentu, aktor menyerahkan hak (melalui norma) untuk mengendalikan tindakan orang lain. Selanjutnya keefektifan norma tergantung pada kemampuan melaksanakan consensus tersebut. Konsensus dan pelaksanaannyalah yang mencegah tanda-tanda ketidakseimbangan perilaku kolektif.

3. **Aktor Korporat :** Dengan kasus norma, Coleman bergerak ke levelmakro, dan melanjutkan analisisnya pada level ini ketika membahas aktor korporat. Dalam suatu kelompok kolektif, aktor tidak dapat bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama.

   Ada berbagai aturan dan mekanisme agar dapat berpindah dari pilihan individu menuju pilihan kolektif. Coleman beragumen bahwa aktor korporat dan aktor manusia memiliki tujuan. Terlebih lagi dalam struktur korporat seperti organisasi, aktor manusia bisa mengejar tujuan mereka yang berbeda dengan tujuan korporat.

   Sebagai seorang teoritisi pilihan rasional, Coleman mulai dari individu dan dari gagasan bahwa semua hak dan sumber daya tersedia pada level ini. kepentingan individu menetukan seluruh peristiwa. Didunia modern aktor korporat semakin penting.

   Bagi Coleman, perubahan sosial terpenting adalah munculnya aktor korporat untuk melengkapi aktor “pribadi alami”. Keduanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang sebagai aktor karena "mengontrol sumber daya dan peristiwa, kepentingan akan sumber daya dan peristiwa, serta kapabilitas untuk bertindak merealisasikan kepentingan – kepentingan tersebut melalui control".

Coleman membedakan struktur primordial yang didasarkan pada keluarga, dengan struktur yang bertujuan. Struktur primordial mengalami kegagalan ketika fungsi – fungsi mereka mulai tersebar dan diambil alih oleh aktor korporat. Sehingga tujuan karya Coleman adalah memberikakan landasan bagi konstruksi struktur sosial yang layak dilakukan, ketika struktur primordial tempat bergantung orang mulai punah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id